

ABSTRAK

Perangkat daerah merupakan sebuah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan segala peraturan-peraturan daerah yang dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana Peraturan Daerah, khususnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran terhadap parkir liar di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah bagaimana tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan Bagaimana implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Adapun tujuan uraian permasalahan tersebut diatas, di bawah ini penulis akan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif empiris. Maka penelitian ini berbasis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literature-literatur dan Bahan hukum primer yaitu penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap subjek yang ditentukan dalam hal ini Satpol PP, petugas parkir dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dan implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja beberapa telah sesuai dengan perundang-undangan tetapi tindakan Operasi Cabut Pentil (OCP) tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum. Dengan penelitian ini besar harapan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Parkir Liar dan Masyarakat serta pemerintah dapat lebih memahami dan mematuhi hak dan kewajiban yang dimiliki dan menjalankan tugas sesuai yang diembannya masing-masing.